



# RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Wajo  
**Tahun 2026**

*"Dari Desa, Oleh Desa, Untuk Indonesia"*



## KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo Tahun 2025 dapat kami selesaikan tepat waktu.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo Tahun 2025, telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Tahun 2025-2026, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Wajo Tahun 2025-2026. Dalam dokumen Renja ini berisikan pernyataan-pernyataan kondisi keuangan, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran Dinas PMD Kabupaten Wajo pada tahun berkenaan.

Rencana Kerja Dinas PMD Tahun 2025 ini bukanlah sekedar dokumen formal, namun merupakan komitmen nyata dari seluruh jajaran untuk terus berinovasi, efisien, dan berintegritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Maka penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya Rencana Kerja ini bukan pada proses perumusannya saja, tetapi akan sangat dipengaruhi oleh implementasinya.

Kami meyakini bahwa sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik antar semua pihak terkait menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan setiap program dan kegiatan yang terangkum dalam rencana kerja ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penyusunan rencana kerja ini. Dinas PMD Kabupaten Wajo berkomitmen untuk tetap objektif dan professional dalam menjalankan fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sengkang, Juli 2025

Pt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo

  
  
**ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.AP**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19700815 199003 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang .....	5
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	11
1.4. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU .....	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD .....	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	21
2.2.1 Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi .....	21
2.2.2 Kinerja Pelayanan OPD .....	34
2.2.3 Pengolahan Data Informasi .....	36
2.2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	38
2.3. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD.....	41
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	51
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	62
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	62
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD .....	63
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM.....	65
4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	66
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH.....	79
5.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	79
5.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi OPD pengampu SPM.....	80
5.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs).....	80
BAB VI PENUTUP .....	82
6.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan .....	82
6.2. Rencana Tindak Lanjut.....	83

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo Tahun 2026 merupakan gambaran tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana, dan kapan akan diselesaikan. Rencana Kerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Tahun 2025-2029, dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.

Dinas PMD Kabupaten Wajo sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan Rencana Kerja ini berupaya untuk melaksanakan berbagai hal yang dianggap penting untuk dilaksanakan. Segala sesuatu yang belum dituangkan dan dianggap penting untuk dilaksanakan pada periode berkenaan, maka dokumen rencana kerja ini dapat diubah pada periode pertengahan tahun.

Diseminasi Rencana Kerja (Renja) akan memastikan seluruh anggota instansi memiliki kesamaan pandangan mengenai kearah mana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota harus bekerja, dan bagaimana keberhasilan dan hambatan akan diukur. Hasil dari Rencana Kerja ini akan dituangkan dalam dokumen LKjIP.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana amanat Pasal 260 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional, dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penting untuk perangkat daerah melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, yang akan digunakan sebagai acuan operasional kegiatan perangkat daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) ini bertujuan untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan dan program secara terarah, sesuai dengan rencana dan prioritas yang telah ditetapkan. Penyusunan Rencana Kerja untuk periode tahun 2026, akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah, serta untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo tahun 2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) berupaya untuk melaksanakan berbagai hal yang dianggap penting untuk dilaksanakan. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kabupaten Wajo mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas PMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2026.

Hasil dari pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kabupaten Wajo, selain digunakan dalam penyusunan dokumen LKjIP, akan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan, arahan serta masukan dalam penentuan kebijakan dan peraturan yang menjadi rencana dari pemberdayaan masyarakat dan desa. Hal ini

dimaksudkan agar dalam implementasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan selaras dengan Tujuan dan Sasaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas PMD Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

- Undanguan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6775);
  8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
  10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
  30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah; dan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 154);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 161);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);

37. Peraturan Bupati Wajo Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 173);
38. Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo Tahun 2026 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan dan memberikan gambaran mengenai kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo dalam periode tahun 2026.

Secara Khusus Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo ini mempunyai Tujuan :

1. Menjabarkan arahan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program kerja operasional;
3. Memberikan gambaran kinerja perangkat daerah, mengetahui kelemahan, kekuatan, tantangan, dan peluang perangkat daerah dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
  - 2.2.1. Tugas, Fungsi dan kedudukan organisasi
  - 2.2.2. Kinerja Pelayanan OPD
  - 2.2.3. Pengolahan data informasi
  - 2.2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi opd
- 2.3. Reviu terhadap rancangan awal RKPD
- 2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan OPD terhadap SPM
- 4.2. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan OPD terhadap TPB/SDGs
- 4.3. Program, kegiatan dan sub kegiatan

### **BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH**

- 5.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah
  - 5.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
  - 5.1.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- 5.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi OPD pengampu SPM
- 5.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

### **BAB VI PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Dalam Sub Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kabupaten Wajo tahun 2024 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2025 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo berdasarkan Realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DPMD Wajo tahun-tahun sebelumnya.

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil. Dinas PMD Kabupaten Wajo pada tahun anggaran 2024 melaksanakan 3 Program, 8 Kegiatan dan 21 Sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Tahun 2024 sebagai berikut.

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini terdiri dari 6 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan, yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun anggaran yang dialokasikan pada program ini yaitu, Rp. 3.032.020.911,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.890.765.737,- menunjukkan capaiannya 96,32%

##### **2. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, dan 3 Sub Kegiatan, yang dilaksanakan oleh 2 Bidang yaitu Bidang Bina Pemerintahan Desa, dan Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi dan Desa :

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Adapun anggaran yang dialokasikan pada program ini yaitu, Rp. 2.204.273.200,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.135.960.824,- menunjukkan capaiannya 96,90%

### 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, yang dilaksanakan oleh 2 Bidang yaitu Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi dan Desa, dan Bidang Pengembangan Kerjasama, dan Kelembagaan Masyarakat Desa :

- Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota.

Adapun anggaran yang dialokasikan pada program ini yaitu, Rp. 738.749.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 728.597.891,- menunjukkan capaiannya 98,63%

Berdasarkan tabel monitoring dan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas PMD Kabupaten Wajo per Desember 2024. Besaran Anggaran yang dikelola oleh Dinas PMD Kabupaten Wajo pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 5.975.043.711,- terealisasi sebesar Rp. 5.755.324.452,- yang kemudian secara keseluruhan dapat kami laporkan keuangan terealisasi sebesar 96.32%, dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100,00%.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Wajo

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (intermediate output)/ sub kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2025 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra OPD s.d. Tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(5+7+9))	(11=(10/4))	(12)
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar										
2.13	Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rata-rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pencapaian perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	7 Dokumen	350%	
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dookumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	300%	
2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dookumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	100%	

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (intermediate output)/ sub kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2025 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra OPD s.d. Tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(5+7+9))	(11=(10/4))	(12)
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%	
<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>300%</b>	
2.13.012.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/ Bulan	25 Orang/ Bulan	22 Orang/ Bulan	22 Orang/ Bulan	100%	20 Orang/ Bulan	67 Orang/ Bulan	305%	Jumlah Orang x 12 Bulan
2.13.012.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%	
<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan peningkatan SDM</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>300%</b>	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangann Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	-	2 Paket	200%	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	-	5 Paket	5 Paket	100%	1 Paket	6 Paket	102%	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat	40 Laporan	60 Laporan	40 Laporan	40 Laporan	100%	40 Laporan	140 Laporan	350%	

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (intermediate output)/ sub kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2025 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra OPD s.d. Tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(5+7+9))	(11=(10/4))	(12)
		koordinasi dan konsultasi SKPD									
<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan ketersediaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>300%</b>	
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	12 Unit	17 Unit	850%	
<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan pemenuhan kebutuhan pegawai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>300%</b>	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%	
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%	
<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>300%</b>	
2.13.01.2.09.0006	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	2 Unit	16 Unit	228%	

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (intermediate output)/ sub kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2025 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra OPD s.d. Tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(5+7+9))	(11=(10/4))	(12)
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	15 Unit	-	15 Unit	15 Unit	100%	10 Unit	25 Unit	165%	
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
2.13.04.2.01	<i>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%	
2.13.04.2.01.00	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		-	26 Laporan	-	-	-	-	26 Laporan	-	
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (intermediate output)/ sub kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2025 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra OPD s.d. Tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(5+7+9))	(11=(10/4))	(12)
	<b>LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>										
2.13.05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/ kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang pelakunya masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/ kota</i>	<i>Persentase Desa yang dibina kapasitas kelembagaan dan teknologi tepat gunanya</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	142 Lembaga	2 Lembaga	142 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	4 Lembaga		Target harusnya merujuk pada Lembaga se Kabupaten Kota yaitu (RT, RW, PKK, Posyandu, KPM, LPM, Karang Taruna)
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	4 Laporan		Target merujuk pada 3 jenis kegiatan berbeda pada sub kegiatan, tetapi masih termasuk dalam aspek TTG
2.13.05.2.01.0010	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi tim penggerak PKK	12 Dokumen	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	1 Dokumen	13 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (intermediate output)/ sub kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2025 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d. tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD Tahun 2024			Target program/ kegiatan Renja OPD tahun berjalan 2025	Perkiraan realisasi capaian target program/ kegiatan Renstra OPD s.d. Tahun 2025		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=(7/6))	(9)	(10=(5+7+9))	(11=(10/4))	(12)
	pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga									

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Analisis kinerja pelayanan OPD memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian tujuan organisasi dalam memberikan layanan publik. Kualitas suatu pelayanan sendiri dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya adalah factor ketersediaan sumber daya, kualitas SDM, proses pelayanan, transparansi dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menjadi salah satu urusan wajib bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas PMD yang menjadi penanggung jawab urusan tersebut.

### **2.2.1 Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas PMD Kabupaten Wajo berpedoman pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 173 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 173 Tahun 2021 Tentang SOTK Dinas PMD.

#### **1. Kepala Dinas**

##### **1) Tugas Pokok**

Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **2) Fungsi**

- a. Perumusan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi DPMD; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain terhadap kepala dinas yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

##### **3) Rincian Tugas**

- a. Merumuskan program kerja kesekretariatan, bidang bina pemerintahan desa, bidang pengembangan, kerja sama dan

- kelembagaan Masyarakat desa dan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun kebijakan bidang bina pemerintahan desa, bidang pengembangan, kerja sama dan kelembagaan Masyarakat desa dan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Merumuskan sasaran dalam bidang bina pemerintahan desa, bidang pengembangan, kerja sama dan kelembagaan Masyarakat desa dan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan bidang bina pemerintahan desa, bidang pengembangan, kerja sama dan kelembagaan Masyarakat desa dan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang bina pemerintahan desa, bidang pengembangan, kerja sama dan kelembagaan Masyarakat desa dan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Membina pelaksanaan kebijakan bidang bina pemerintahan desa, bidang pengembangan, kerja sama dan kelembagaan Masyarakat desa dan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengarahkan pelaksanaan kebijakan bidang bina pemerintahan desa, bidang pengembangan, kerja sama dan kelembagaan Masyarakat desa dan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. Melaksanakan aktivitas kerja bidang bina pemerintahan desa, bidang pengembangan, kerja sama dan kelembagaan Masyarakat desa dan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan DPMD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- j. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang bina pemerintahan desa, bidang pengembangan, kerja sama dan kelembagaan Masyarakat desa dan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa;
- k. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- l. Melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang bina pemerintahan desa, bidang pengembangan, kerja sama dan kelembagaan Masyarakat desa dan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sekretaris

### 1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas merencanakan operasional kegiatan, mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyalurkan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan berupa memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan.

### 2) Fungsi

- a. Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang Kesekretariatan DPMD;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesekretariatan DPMD;
- c. Pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

### 3) Rincian Tugas

- a. Merencanakan operasional rencana kegiatan tahunan sekretariat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menghimpun dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan berupa kebijakan, petunjuk teknis serta bahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat;

- c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sekretariat dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan permasalahan;
- d. Merencanakan, menggerakkan mengoordinasikan dan mengendalikan serta merumuskan dan mengajukan pertimbangan teknis pengelolaan sekretariat meliputi administrasi umum dan pengelolaan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- e. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai Tingkat kinerja yang diharapkan;
- i. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

### 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### 1) Tugas Pokok

Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas sub bagian umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2) Rincian Tugas

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian umum dan kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. Mengelola dan melaksanakan urusan surat menyurat;
- f. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan;
- g. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
- h. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- i. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;
- j. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana, dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- l. Mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan;
- m. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

##### 1) Tugas Pokok

Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 2) Rincian Tugas

- a. Merencanakan kegiatan Sub bagian perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dibidang perencanaan dan pelaporan;
- c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian perencanaan dan pelaporan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Mengendalikan rencana kinerja tahunan;
- e. Menyiapkan bahan serta data dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas meliputi pemeliharaan Gedung, pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan kendaraan dinas;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana kerja anggaran dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah;
- h. Menyiapkan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- k. Memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai Tingkat kinerja yang diharapkan;
- l. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik.

## 5. Sub Bagian Keuangan

### 1) Tugas Pokok

Merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas sub bagian keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2) Rincian Tugas

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dibidang keuangan;
- c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan sub bagian keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Melaksanakan pengajian pegawai dilingkup dinas;
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah lingkup dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan dilingkup dinas;
- g. Melaksanakan verifikasi terhadap keuangan dilingkup dinas;
- h. Menyusun laporan keuangan akhir tahun dilingkup dinas;
- i. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- j. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan output yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal;
- k. Memeriksa dan mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan sesuai prosedur pelaksanaan pekerjaan agar tercapai Tingkat kinerja yang diharapkan;
- l. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;

- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada pimpinan secara berkala sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik.

## 6. Bidang Bina Pemerintahan Desa

### 1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan penataan desa dan desa adat, aparatur pemerintah desa dan desa adat serta keuangan dan aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2) Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintahan dan Penataan Desa dan Desa Adat, Aparatur pemerintah desa dan desa adat serta keuangan dan aset desa;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Penataan Desa dan Desa Adat, Aparatur pemerintah desa dan desa adat serta keuangan dan aset desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Penataan Desa dan Desa Adat, Aparatur pemerintah desa dan desa adat serta keuangan dan aset desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

### 3) Rincian Tugas

- a. Merencanakan operasional kegiatan bidang bina pemerintahan desa sesuai dengan rencana kerja dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

- c. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang bina pemerintahan desa;
- d. Menyelia bawahan melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugasnya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- e. Menyelenggarakan kebijakan pemerintahan dan penataan desa dan desa adat, aparatur pemerintah desa dan desa adat serta keuangan dan aset desa;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan dan mengelola bahan workshop peningkatan kapasitas BPD dan Lembaga desa;
- h. Melaksanakan dan mengelola bahan kegiatan bimbingan dan inventarisasi data Kepala Desa dan BPD;
- i. Melaksanakan pendmappingan Pilkada serentak gelombang ke-Tiga;
- j. Melaksanakan bimbingan/pelatihan tentang tugas BPD;
- k. Melaksanakan bimbingan/pelatihan tentang tata cara musyawarah desa;
- l. Melaksanakan dan mengelola bahan workshop administrasi pemerintah desa bagi perangkat desa;
- m. Melaksanakan bimbingan/pelatihan administrasi desa;
- n. Melaksanakan bimbingan/pelatihan penyusunan peraturan desa dan Keputusan Kepala Desa;
- o. Melaksanakan bimbingan/pelatihan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Menyiapkan dan mengelola bahan kegiatan bimbingan, inventarisasi data Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- q. Melaksanakan kegiatan bimbingan pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- r. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan mekanisme pembentukan desa adat;
- s. Menyusun pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa;
- t. Melaksanakan verifikasi/asistensi pengelolaan keuangan desa;

- u. Menyiapkan dan mengelola bahan workshop penatausahaan keuangan dan aset desa;
  - v. Melaksanakan bimbingan/pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - w. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemerintahan dan penataan desa dan desa adat, aparatur pemerintah desa dan desa adat serta keuangan dan aset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - x. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - y. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
  - z. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
  - aa. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupaun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.
7. Bidang Pengembangan Kerjasama, dan Kelembagaan Masyarakat Desa
- 1) Tugas Pokok
 

Membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merencanakan operasional serta mengoordinasikan kegiatan evaluasi perkembangan desa dan akses informasi, kelembagaan dan ketahanan Masyarakat serta Kerjasama desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Fungsi
    - a. Perumusan kebijakan teknis evaluasi perkembangan desa dan akses informasi, kelembagaan dan ketahanan Masyarakat serta kerja sama desa;
    - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan evaluasi perkembangan Desa dan Akses Informasi, Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat serta Kerjasama Desa;
    - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas evaluasi perkembangan desa dan akses informasi, kelembagaan dan ketahanan Masyarakat serta kerja sama desa; dan
    - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

### 3) Rincian Tugas

- a. Merencanakan operasional kegiatan Bidang Pengembangan, Kerja sama dan kelembagaan Masyarakat sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Bidang Pengembangan, Kerjasama dan Kelembagaan Masyarakat;
- d. Menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugasnya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
- e. Menyelenggarakan kebijakan evaluasi perkembangan desa dan akses informasi, kelembagaan dan ketahanan Masyarakat Kerjasama desa;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan bimbingan/pelatihan penguatan kapasitas data Profil Desa dan Kelurahan;
- h. Melaksanakan kegiatan sosialisasi evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan;
- i. Melaksanakan kegiatan pengembangan akses informasi Masyarakat Desa;
- j. Melaksanakan bimbingan/pelatihan pelaksanaan kegiatan Desa Labsite/
- k. Melaksanakan kegiatan pembinaan pembentukan LPMDK, Karang Taruna, RT/RW dan Lembaga lainnya;
- l. Melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- m. Melaksanakan kegiatan Program Inovasi Desa;
- n. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tentang Kerjasama desa;
- o. Melaksanakan kegiatan sosialisasi Kerjasama desa;
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program evaluasi perkembangan desa dan akses informasi, kelembagaan

- dan ketahanan Masyarakat serta Kerjasama desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
  - r. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
  - s. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
  - t. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.
8. Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi dan Desa
- 1) Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merencanakan operasional serta mengkoordinasikan kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Pendayagunaan SDA dan Teknologi Perdesaan serta Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  - 2) Fungsi
    - a. Perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan SDA dan teknologi perdesaan serta pembangunan dan pengembangan Kawasan perdesaan;
    - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan SDA dan teknologi perdesaan serta pembangunan dan pengembangan Kawasan perdesaan;
    - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan SDA dan teknologi perdesaan serta pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan; dan
    - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
  - 3) Rincian Tugas
    - a. Merencanakan operasional kegiatan bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa sesuai dengan rencana kerja dinas

- pemberdayaan Masyarakat dan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas masing-masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
  - c. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pembangunan dan usaha ekonomi desa;
  - d. Menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan tugasnya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan efisien;
  - e. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan SDA dan teknologi perdesaan serta pembangunan dan pengembangan Kawasan perdesaan;
  - f. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. Melaksanakan workshop BUMDes untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola atau pengurus BUMDes di Desa;
  - h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan BUMDes serta Usaha Ekonomi Desa;
  - i. Melaksanakan pembinaan kepada BUMDes binaan yang dipersiapkan untuk mengikuti lomba BUMDes Berprestasi ditingkat provinsi dan nasional setiap tahun pelaksanaannya;
  - j. Melaksanakan inventarisasi jenis/karakteristik TTG di Desa;
  - k. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan TTG berbasis potensi daerah;
  - l. Melaksanakan kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat nasional;
  - m. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pengurus TTG;
  - n. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengembangan kelompok TTG;
  - o. Melaksanakan kegiatan pembinaan PAMSIMAS;
  - p. Melaksanakan bimbingan/pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan asset desa;
  - q. Melakukan inventarisasi potensi pengembangan Kawasan perdesaan;

- r. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan usaha desa, program pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan SDA dan teknologi perdesaan serta pembangunan dan pengembangan Kawasan perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Mengevaluasi hasil kerja bawahan;
- t. Menyediakan data dan informasi terkait bidang tugasnya sebagai bahan perumusan dan evaluasi kebijakan;
- u. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil pelaksanaan tugas; dan
- v. Melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

#### 9. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Perbup Wajo Nomor 173 Tahun 2021 Tentang SOTK Dinas PMD, yang dimaksud dengan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional dan pelaksana masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

### **2.2.2 Kinerja Pelayanan OPD**

Adapun untuk IKU dan IKK Tahun 2025 mengacu pada Renstra Transisi Dinas PMD Tahun 2025-2026. Target Indikator kinerja Dinas PMD Kabupaten Wajo ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah tahun 2025, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Berikut Indikator Kinerja Dinas PMD Kabupaten Wajo secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.2.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo**

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKU/ IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Nilai Indeks Desa Membangun		IKU	0.7485	0.7677	0.7874	0.8075	0.8282	0.7299	0.7281	0.7677	0.7874	
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		IKU	76	78	80	82	84	74.8	76	78	80	
3	Rata-rata Kenaikan Status Desa		IKU	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	3.27%	-0.20%	3.27%	3.27%	
4	Persentase Desa berstatus Desa Mandiri		IKU	22%	27%	32%	37%	42%	17%	17%	27%	32%	
5	Persentase Desa yang memiliki PAD BUMDes		IKU	28%	32%	32%	34%	34%	26%	-	32%	32%	
6	Persentase BUM Desa yang Aktif		IKU	100%	100%	100%	100%	100%	74%	-	100%	100%	
7	Persentase Koperasi Desa Merah Putih yang Aktif		IKU	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	
8	Jumlah jenis lembaga kemasyarakatan desa yang dibina		IKU	2	2	3	3	3	2	2	2	3	
9	Persentase LKD yang Aktif		IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		IKK	94.36%	95.06%	95.76%	96.46%	97.16%	93.66%	-	95.06%	95.76%	
11	Persentase PKK yang Aktif		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12	Persentase Posyandu yang Aktif		IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### 2.2.3 Pengolahan Data Informasi

Pengolahan data dan informasi merupakan tahapan krusial dalam siklus informasi, dimana data mentah diubah menjadi sesuatu yang memiliki makna dan kegunaan dalam pengambilan keputusan. Data informasi yang disajikan pada sub bab ini merupakan data capaian RENSTRA tahun 2019-2024, dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kebutuhan tahun 2026 beserta tahun-tahun berikutnya.

1. Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	122	123	132	132	132	
Jumlah seluruh kantor pemerintahan	142	142	142	142	142	
<b>Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik</b>	<b>85.92 %</b>	<b>86.62 %</b>	<b>92.96 %</b>	<b>92.96 %</b>	<b>92.96 %</b>	

2. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah kelompok binaan LPM	190	190	190	190	190	190
Jumlah LPM	190	190	190	190	190	190
<b>Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

3. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Binaan PKK	0	0	0	0	7556	7556
Jumlah PKK	190	190	190	190	190	190
<b>Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

4. Persentase LSM aktif

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah LSM Aktif	0	0	0	0	0	0
Jumlah LSM	0	0	0	0	0	0
<b>Persentase LSM Aktif</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

5. Persentase LPM berprestasi

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
--------	------	------	------	------	------	------

Jumlah LPM Berprestasi	0	0	0	0	0	0
Jumlah LPM	190	190	190	190	190	190
<b>Persentase LPM Berprestasi</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

6. Persentase PKK aktif

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PKK Aktif	190	190	190	190	190	190
Jumlah PKK	190	190	190	190	190	190
<b>Persentase PKK Aktif</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

7. Persentase Posyandu aktif

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Posyandu Aktif	453	453	453	462	462	462
Jumlah Posyandu	453	453	453	462	462	462
<b>Persentase posyandu aktif</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

8. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	9	9	9	0	0	0
Total program pemberdayaan masyarakat	9	9	9	0	0	0
<b>Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

9. Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Program pemberdayaan masyarakat yang di kembangkan dan dipelihara masyarakat	2	2	13	0	0	0
Total pasca program pemberdayaan masyarakat	2	2	13	0	0	0
<b>Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

10. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa/ Kelurahan swasembada	4	4	4	0	0	0
Jumlah Desa/ Kelurahan	190	190	190	190	190	190
<b>Persentase Desa berstatus swasembada terhadap total desa</b>	<b>2.1%</b>	<b>2.1%</b>	<b>2.1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

#### 2.2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Isu-isu Strategis merupakan kondisi atau hal harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Perumusan isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka dirumuskan isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan Kabupaten Wajo diuraikan sebagai berikut

Dinas PMD Kabupaten Wajo sebagai Perangkat Daerah yang berfokus pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mengidentifikasi permasalahan umum yaitu **"Rendahnya Kualitas Pembangunan dan Kemandirian Desa"** sehingga dipandang perlu untuk segera memperbaiki hal tersebut, seiring dengan besarnya alokasi Dana Desa dan tuntutan digitalisasi di tingkat Desa

Berikut adalah isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas PMD :

1. Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa, focus utamanya adalah memastikan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) tepat sasaran dan transparan.
2. Penguatan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, untuk Kemandirian ekonomi Desa. Dinas PMD sendiri berperan penting untuk menjembatani BUM Desa dan/atau Koperasi Desa dengan pihak swasta atau perbankan untuk skala ekonomi yang lebih besar
3. Digitalisasi Desa (Smart Village), untuk memastikan desa beralih ke pelayanan berbasis digital. Namun kesenjangan infrastruktur masih perlu diperhatikan karena masih adanya daerah *blank spot* yang menghambat jalannya administrasi desa berbasis online.

4. Pengentasan Kemiskinan dan Konvergensi Stunting, Dinas PMD memiliki fungsi koordinatif untuk memastikan program desa sejalan dengan agenda nasional khususnya Ketahanan Pangan Desa untuk pengentasan kemiskinan, dan Konvergensi Stunting untuk memastikan KPM Desa memantau kesehatan ibu hamil dan balita.
5. Kesetaraan Gender, dibutuhkan perubahan paradigma masyarakat bahwa perempuan merupakan sebagai pihak yang setara dengan laki-laki, dan memiliki kontribusi yang berharga, sehingga Perlu kebijakan responsive gender untuk mengatasi kondisi ketimpangan gender.

**Tabel 2.3.**

**Teknik menyimpulkan isu strategis perangkat daerah**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Masyarakat Kabupaten Wajo yang terkenal sebagai pedagang yang ulung, sehingga dengan adanya program koperasi desa, sekiranya dapat membantu masyarakat untuk melakukan pinjaman usaha	Manajemen koperasi desa yang lemah, baik dari segi sumber daya manusia, maupun struktur organisasinya			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pengembangan ekonomi masyarakat terutama didaerah 3 T (Terluar, Termiskin, dan Tertinggal)	Penguatan Ekonomi Desa Melalui BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih, untuk Kemandirian ekonomi Desa. Dinas PMD sendiri berperan penting untuk menjembatani BUM Desa dan/atau Koperasi Desa dengan pihak swasta atau perbankan untuk skala ekonomi yang lebih besar
	Pinjaman Modal Koperasi Desa yang berasal dari Bank HIMBARA dengan Jaminan Dana Desa, berpotensi akan mempengaruhi kegiatan di desa, apabila terjadi gagal bayar					Pemberdayaan Masyarakat melalui desa mandiri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

### **2.3. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam rancangan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2026, program dan kegiatan yang dicantumkan telah sesuai dengan perencanaan awal yaitu Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagaimana telah diusulkan oleh Dinas PMD Kabupaten Wajo, baik dari segi jumlah Program dan Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Target Indikator kinerja serta Pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program : 3
2. Kegiatan : 8
3. Sub kegiatan : 25
4. Pagu Ranwal : Rp. 5.070.575.637,-

Tabel 2.4.

## Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Wajo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa dan Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA										
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah (outcome)		Rata-rata capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	100%	2,620,302,237						
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	24,000,000						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (output)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16,000,000						
	Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (output)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3,000,000						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2,000,000						
	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (output)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	3,000,000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa dan Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	3,000,000						
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			100%	2,103,562,237						
	<b>Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah (output)</b>		<b>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>20 Orang/ Bulan</b>	<b>2,097,562,237</b>						
			<b>Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>3,000,000</b>						
			<b>Jumlah Laporan keuangan bulanan triwulan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>3,000,000</b>						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa dan Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
			<b>laporan keuangan akhir tahun SKPD</b>								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	2,097,562,237						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	3,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan keuangan bulanan triwulan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Laporan	3,000,000						
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			100%	175,500,000						
	<b>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (output)</b>		<b>Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</b>	<b>1 Paket</b>	<b>2,500,000</b>						
			<b>Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</b>	<b>5 Paket</b>	<b>8,000,000</b>						
			<b>Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</b>	<b>70 Laporan</b>	<b>165,000,000</b>						
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangann Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Paket	2,500,000						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa dan Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	8,000,000						
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	70 Laporan	165,000,000						
4	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			100%	40,000,000						
	<b>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah (output)</b>		<b>Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</b>	<b>4 Unit</b>	<b>40,000,000</b>						
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya										
			Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	40,000,000						
5	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			100%	225,240,000						
	<b>Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pegawai (output)</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>40,000,000</b>						
			<b>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>65,240,000</b>						
			<b>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>120,000,000</b>						
	Penyediaan jasa surat menyurat										
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	40,000,000						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa dan Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	65,240,000						
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor										
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	120,000,000						
6	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			100%	52,000,000						
	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah (output)</b>		<b>Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</b>	7 Unit	40,000,000						
			<b>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</b>	15 Unit	12,000,000						
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan										
			Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	40,000,000						
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya										
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	15 Unit	12,000,000						
II	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi dan Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
7	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa (outcome)		Persentase Penyelesaian kegiatan fasilitasi tata kelola desa	100%	2,220,273,400						
			Persentase BUM Desa yang dibina	100%							
			Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis prodeskel/ epdeskel dalam perencanaan dan pelaporan	190							
	<i>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa</i>			100%	2,220,273,400						
	<i>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa (output)</i>		<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,060,273,400</i>						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>50,000,000</i>						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>30,000,000</i>						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>30,000,000</i>						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>30,000,000</i>						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa dan Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
			<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>20,000,000</b>						
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,060,273,400						
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	50,000,000						
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	30,000,000						
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1 Dokumen	30,000,000						
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	30,000,000						
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	20,000,000						
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa dan Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
8	Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan desa (outcome)		Persentase Desa yang difasilitasi pembinaan teknologi tepat gunanya	100%	230,000,000						
			Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	100%							
	<i>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/ kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang pelakunya masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/ kota</i>			100%	230,000,000						
	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (output)		Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	3 Laporan	60,000,000						
		Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	4 Dokumen	130,000,000							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	1 Lembaga	40,000,000							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisi dan Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
			<b>Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</b>								
	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna										
			Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	3 Laporan	60,000,000						
	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga										
			Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	4 Dokumen	130,000,000						
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	40,000,000						
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>5,070,575,637</b>						

#### **2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada Awal Tahun 2025 dilaksanakan MUSRENBANG Kabupaten untuk menghimpun usulan-usulan masyarakat dan pemangku kepentingan, namun hasil dari pelaksanaan MUSRENBANG RKPD Tahun 2025 untuk Dinas PMD Kabupaten Wajo, tidak terdapat usulan program dan kegiatan (sinergitas) dari masyarakat, dan/atau dari legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Wajo.

Adapun alur proses usulan program dan kegiatan masyarakat (sinergitas dari legislatif) untuk tahun 2025 secara berurutan sebagai berikut:

1. Usulan Sinergitas Anggota Legislatif/DPRD Kabupaten Wajo, Bappeda Kabupaten, dan Kepala Desa
2. Validasi usulan sinergitas oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo
3. Pengajuan usulan Sinergitas ke TAPD (Bappelitbangda dan BKAD Kabupaten Wajo)
4. Konsultasi dengan OPD terkait Usulan Sinergitas yang dapat diakomodir
5. Usulan Sinergitas yang diakomodir oleh OPD dibahas/diverifikasi pada acara MUSRENBANG Kabupaten
6. Usulan Sinergitas Anggota Legislatif/DPRD Kabupaten Wajo/Bappeda Kabupaten/Kepala Desa dimasukkan dalam Rencana Kegiatan OPD

**Tabel 2.5.**  
**Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2025 Kabupaten Wajo**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

**Tabel 2.6.**  
**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Masyarakat**  
**Tahun 2025 Kabupaten Wajo**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Tabel 2.7.

Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja OPD Kabupaten Wajo

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA										
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah (outcome)		Rata-rata capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	100%	2,620,302,237						
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	24,000,000						
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (output)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16,000,000						
	Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (output)		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3,000,000						
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2,000,000						
	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (output)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	3,000,000						

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	3,000,000						
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			100%	2,103,562,237						
	<b>Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah (output)</b>		<b>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>20 Orang/ Bulan</b>	<b>2,097,562,237</b>						
			<b>Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>3,000,000</b>						
			<b>Jumlah Laporan keuangan bulanan triwulan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>3,000,000</b>						

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
			<b>laporan keuangan akhir tahun SKPD</b>								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
			Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/ Bulan	2,097,562,237						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
			Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	3,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD										
			Jumlah Laporan keuangan bulanan triwulan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Laporan	3,000,000						
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			100%	175,500,000						
	<b>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (output)</b>		<b>Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</b>	<b>1 Paket</b>	<b>2,500,000</b>						
			<b>Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</b>	<b>5 Paket</b>	<b>8,000,000</b>						
			<b>Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</b>	<b>70 Laporan</b>	<b>165,000,000</b>						
	Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangann Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 Paket	2,500,000						
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan										

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Paket	8,000,000						
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD										
			Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	70 Laporan	165,000,000						
4	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			100%	40,000,000						
	<b>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah (output)</b>		<b>Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</b>	<b>4 Unit</b>	<b>40,000,000</b>						
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya										
			Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit	40,000,000						
5	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			100%	225,240,000						
	<b>Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pegawai (output)</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>40,000,000</b>						
			<b>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>65,240,000</b>						
			<b>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>120,000,000</b>						
	Penyediaan jasa surat menyurat										
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	40,000,000						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik										

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	65,240,000						
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor										
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	120,000,000						
6	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			100%	52,000,000						
	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah (output)</b>		<b>Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya</b>	7 Unit	40,000,000						
			<b>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</b>	15 Unit	12,000,000						
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan										
			Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	40,000,000						
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya										
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	15 Unit	12,000,000						
II	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>										

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
7	Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa (outcome)		Persentase Penyelesaian kegiatan fasilitasi tata kelola desa	100%	2,220,273,400						
			Persentase BUM Desa yang dibina	100%							
			Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis prodeskel/ epdeskel dalam perencanaan dan pelaporan	190							
	<i>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa</i>			100%	2,220,273,400						
	<i>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa (output)</i>		<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2,060,273,400</i>						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>50,000,000</i>						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>30,000,000</i>						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>30,000,000</i>						
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>30,000,000</i>						

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
			<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>20,000,000</b>						
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,060,273,400						
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	50,000,000						
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	30,000,000						
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	1 Dokumen	30,000,000						
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	30,000,000						
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa										
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	20,000,000						
III	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>										

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
8	Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan desa (outcome)		Persentase Desa yang difasilitasi pembinaan teknologi tepat gunanya	100%	230,000,000						
			Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya	100%							
	<i>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/ kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang pelakunya masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/ kota</i>			100%	230,000,000						
	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (output)		Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	3 Laporan	60,000,000						
		Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	4 Dokumen	130,000,000							
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	1 Lembaga	40,000,000							

No	Rancangan Renja					Hasil Prioritas Masukan Masyarakat					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9	10	12
			<b>Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</b>								
	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna										
			Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	3 Laporan	60,000,000						
	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga										
			Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	4 Dokumen	130,000,000						
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	40,000,000						
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>5,070,575,637</b>						

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Membangun dari desa dan dari bawah adalah strategi yang berorientasi pada penguatan akar perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat local serta memperhatikan pemenuhan hak dasar warga negara untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan inklusif. Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi pendekatan utama dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Penduduk miskin dan rentan menjadi fokus dalam pelaksanaan perlindungan sosial, untuk membantu mengurangi beban kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasar. Maka dari itu, kebijakan ke depan dilakukan dengan memastikan perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan program-program bantuan, jaminan, layanan, dan kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan ekonomi dari tingkat desa. Pembangunan dari desa juga mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Pembangunan tersebut menekankan keterkaitan desakota (*rural-urban linkages*). Bersamaan dengan pembangunan di wilayah perdesaan, pembangunan kawasan perkotaan dilakukan untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan.

**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi**

No	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Nasional</b>		
1	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	ASTA CITA	
2	Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Program Prioritas RKP Tahun 2026	
3	Pemberantasan Kemiskinan	Program Prioritas RKP Tahun 2026	
<b>B.</b>	<b>Provinsi</b>		
1			
2			

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PMD Tahun 2025-2029 selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka Dinas PMD Kabupaten Wajo bertekad mendukung tujuan dan sasaran RPJMD dan RENSTRA PMD yaitu:

Tujuan RPJMD : Menghadirkan pelayanan public yang mudah, terjangkau, cepat dan tepat bagi seluruh masyarakat.

Sasaran RPJMD : Meningkatnya tatakelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif

#### 1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu atau satu periode tertentu. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas PMD Kabupaten Wajo, maka rumusan tujuan yang ingin dicapai adalah **"Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa"**.

#### 2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Tujuan yang ingin dicapai, maka Sasaran yang ingin dicapai Dinas PMD yaitu :

- a. Berkembangnya Status Pembangunan Desa;
- b. Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa;
- c. Meningkatnya Kapasitas SDM Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien.

**Tabel 3.2.**  
**Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2026	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun	Angka	0.7677	
		1 Berkembangnya Status Pembangunan Desa	Rata-rata Kenaikan Status Desa	Persentase	2.56%	
			Persentase Desa berstatus Desa Mandiri	Persentase	27%	
		2 Meningkatkan Usaha Ekonomi Desa		Persentase Desa yang memiliki PAD BUM Desa	Persentase	30%
				Persentase BUM Desa yang Aktif	Persentase	100%
				Persentase Koperasi Desa Merah Putih yang Aktif	Persentase	100%
		3 Meningkatkan Kapasitas SDM Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa		Jumlah jenis Lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	Angka	2
				Persentase LKD yang Aktif	Persentase	100%
		4 Meningkatkan tata kelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	78

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari pemberian Otonomi Daerah yang seluas-luasnya kepada daerah, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

**Tabel 4.1.**  
**Dukungan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan OPD terhadap SPM**  
**Tahun 2025**

No	Indikator SPM	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
				Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6

**4.2. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD terhadap TPB/ SDGs**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs meliputi dimensi pembangunan social, ekonomi, dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait antara satu dengan yang lain. Upaya pencapaian pada satu dimensi pembangunan tidak terlepas dari pencapaian dimensi pembangunan lainnya sehingga mencapai pencapaian pada ketiga dimensi tersebut.

**Tabel 4.2.**  
**Dukungan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan OPD terhadap**  
**TPB/SDGs Tahun 2025**

No	Indikator TPB/SDGs	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025	
				Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6

#### **4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan merupakan sarana yang penting bagi perangkat daerah untuk merespon kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan Desa di Kabupaten Wajo. Penyusunan Program dilakukan dengan mengidentifikasi Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dengan masalah yang dihadapi masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Dinas PMD Kabupaten Wajo sebagai unsur pelaksana Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, akan melaksanakan program yaitu :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Tabel 4.3.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Wajo

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					100%	6,712,175,816						100%	6,523,861,690	
2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					100%	6,712,175,816						100%	6,523,861,690	
2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA														
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah (outcome)	Rata-rata capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah				100%	3,800,894,696						100%	3,869,936,695	
2.13.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		<i>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (output)</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	0	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2,250,000						2 Dokumen	8,000,000	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah (output)</i>	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	0	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	500,000						2 Dokumen	2,000,000	
		<i>Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (output)</i>	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000						1 Laporan	3,000,000	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2,250,000	KAB WAJO	DAU				2 Dokumen	8,000,000	DPMD
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	500,000	KAB WAJO	DAU				2 Dokumen	2,000,000	DPMD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	KAB WAJO	DAU				1 Laporan	3,000,000	DPMD
	<b>2.13.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														
		<b>Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah (output)</b>	<b>Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>0</b>	<b>22 Orang/ Bulan</b>	<b>20 Orang/ Bulan</b>	<b>20 Orang/ Bulan</b>	<b>3,366,634,696</b>						<b>20 Orang/ Bulan</b>	<b>3,392,736,695</b>	
			<b>Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD</b>	<b>0</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>2,000,000</b>						<b>1 Laporan</b>	<b>2,000,000</b>	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan	20 Orang/ Bulan	3,366,634,696	KAB WAJO	PAD, DAU				20 Orang/ Bulan	3,392,736,695	DPMD
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	KAB WAJO	DAU				1 Laporan	2,000,000	DPMD
	<b>2.13.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>														
		<b>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (output)</b>	<b>Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor</b>	<b>0</b>	<b>1 Paket</b>	<b>0 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>450,000</b>						<b>1 Paket</b>	<b>2,200,000</b>	
			<b>Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</b>	<b>0</b>	<b>5 Paket</b>	<b>1 Paket</b>	<b>2 Paket</b>	<b>5,000,000</b>						<b>2 Paket</b>	<b>5,000,000</b>	
			<b>Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</b>	<b>0</b>	<b>40 Laporan</b>	<b>40 Laporan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>172,860,000</b>						<b>4 Laporan</b>	<b>200,000,000</b>	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi Listrik/ Penerangann Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		1 Paket	0 Paket	1 Paket	450,000	KAB WAJO	PAD				1 Paket	2,200,000	DPMD
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan														

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		5 Paket	1 Paket	2 Paket	5,000,000	KAB WAJO	DAU				2 Paket	5,000,000	DPMD
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		40 Laporan	40 Laporan	4 Laporan	172,860,000	KAB WAJO	DAU				4 Laporan	200,000,000	DPMD
	<b>2.13.01.2.07</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>														
		<b>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah (output)</b>	<b>Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan</b>	<b>0</b>	<b>2 Unit</b>	<b>11 Unit</b>	<b>1 Unit</b>	<b>380,000</b>						<b>3 Unit</b>	<b>10,000,000</b>	
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya														
			Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		2 Unit	11 Unit	1 Unit	380,000	KAB WAJO	DAU				3 Unit	10,000,000	DPMD
	<b>2.13.01.2.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>														
		<b>Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pegawai (output)</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>30,000,000</b>						<b>12 Laporan</b>	<b>25,000,000</b>	
			<b>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>38,300,000</b>						<b>12 Laporan</b>	<b>40,000,000</b>	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>148,750,000</i>						<i>12 Laporan</i>	<i>150,000,000</i>		
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat															
			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	30,000,000	KAB WAJO	DAU					12 Laporan	25,000,000	DPMD
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik															
			Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	38,300,000	KAB WAJO	DAU					12 Laporan	40,000,000	DPMD
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor															
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	148,750,000	KAB WAJO	DAU					12 Laporan	150,000,000	DPMD
	<b>2.13.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>															
		<i>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah (output)</i>	<i>Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara</i>	<i>7 Unit</i>	<i>7 Unit</i>	<i>2 Unit</i>	<i>7 Unit</i>	<i>25,000,000</i>						<i>7 Unit</i>	<i>20,000,000</i>		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>dan dibayarkan pajaknya</i>													
			<i>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi</i>	0	0	15 Unit	15 Unit	7,270,000						15 Unit	10,000,000	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan														
			Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	7 Unit	2 Unit	7 Unit	25,000,000	KAB WAJO	DAU				7 Unit	20,000,000	DPMD
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya														
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			15 Unit	15 Unit	7,270,000	KAB WAJO	DAU				15 Unit	10,000,000	DPMD
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														
		Meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa (outcome)	Persentase Penyelesaian kegiatan fasilitasi tata kelola desa				100%	2,272,001,120						100%	2,158,693,332	
			Persentase BUM Desa yang dibina				100%							100%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
											Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Desa yang menerapkan sistem informasi desa berbasis prodeskel/ epdeskel dalam perencanaan dan pelaporan				190							190			
	<b>2.13.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa</b>															
		<b>Terlaksananya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa (output)</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	1 Dokumen	<b>1 Dokumen</b>	<b>2,161,281,120</b>	<b>KAB WAJO</b>	<b>DAU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>2,063,693,332</b>		
			<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa</b>	-	-	-	<b>1 Dokumen</b>	<b>25,000,000</b>							-	-	
			<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>1 Dokumen</b>	<b>30,000,000</b>							<b>1 Dokumen</b>	<b>30,000,000</b>	
			<b>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>1 Dokumen</b>	<b>20,720,000</b>							<b>1 Dokumen</b>	<b>20,000,000</b>	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Profil Desa	-	-	-	1 Dokumen	10,000,000						1 Dokumen	20,000,000	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	-	-	-	1 Dokumen	25,000,000						-	25,000,000	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,161,281,120	KAB WAJO	DAU				1 Dokumen	2,063,693,332	DPMD
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	-	-	-	1 Dokumen	25,000,000	KAB WAJO	PAD				-	-	DPMD
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	30,000,000	KAB WAJO	PAD				1 Dokumen	30,000,000	DPMD
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan				1 Dokumen	20,720,000	KAB WAJO	PAD				1 Dokumen	20,000,000	DPMD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa													
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	-	-	-	1 Dokumen	10,000,000	KAB WAJO	PAD				1 Dokumen	20,000,000	DPMD
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	-	-	-	1 Dokumen	25,000,000	KAB WAJO	PAD				-	25,000,000	DPMD
	2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>														
		Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan desa (outcome)	Persentase Desa yang difasilitasi pembinaan teknologi tepat gunanya				100%	639,280,000						100%	495,231,663	
			Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya				100%									100%
	2.13.05.2.01	<i>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/ kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang pelakunya masyarakat hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/ kota</i>														

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		<i>Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (output)</i>	<i>Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>	-	-	-	<i>1 Dokumen</i>	<i>19,280,000</i>						-	<i>60,000,000</i>	
			<i>Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna</i>	0	0	0	<i>3 Laporan</i>	<i>20,000,000</i>						<i>3 Laporan</i>	<i>80,000,000</i>	
			<i>Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga</i>	0	0	0	<i>4 Dokumen</i>	<i>600,000,000</i>						<i>4 Dokumen</i>	<i>355,231,663</i>	
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa dalam	-	-	-	1 Dokumen	19,280,000	KAB WAJO	PAD				-	60,000,000	DPMD

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2026	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna				3 Laporan	20,000,000	KAB WAJO	PAD				3 Laporan	80,000,000	DPMD
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga				4 Dokumen	600,000,000	KAB WAJO	DAU				4 Dokumen	355,231,663	DPMD

**BAB V**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH**

**5.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu organisasi, tim, atau individu dalam mencapai target strategis yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup analisis bagaimana Perangkat Daerah dapat mengelola dan mengimplementasikan kebijakan, Tujuan dan Sasaran yang berkaitan dengan tanggung jawabnya, khususnya pada Dinas PMD sendiri yaitu terkait Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Secara garis besar, perbedaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terletak pada cakupan dan level strategisnya. IKU berfokus pada hasil akhir yang besar misalnya manfaat, nilai, dan perubahan yang dirasakan (outcome), sedangkan IKK lebih ke arah teknis pelaksanaan kegiatan (output).

5.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

**Tabel 5.1.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo**

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja (Tahun)		Kondisi Akhir Renstra
			2026	2027	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa (TUJUAN)	Indeks Desa Membangun (Indeks)	Indeks	0.7677	0.7874	0.8494
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	Angka	78	80	86
Berkembangnya Status Pembangunan Desa	Rata-rata Kenaikan Status Desa (%)	Persentase	2.56%	2.56%	2.56%
	Persentase Desa Mandiri (%)	Persentase	27%	32%	47%
Meningkatnya Kapasitas SDM Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina (Angka)	Angka	2 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga
	Persentase LKD yang Aktif (%)	Persentase	100%	100%	100%
Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	Persentase Desa yang memiliki PAD BUM Desa (%)	Persentase	30%	32%	36%
	Persentase BUM Desa yang Aktif (%)	Persentase	100%	100%	100%
	Persentase Koperasi Desa Merah Putih yang Aktif (%)	Persentase	100%	100%	100%

### 5.1.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

**Tabel 5.2.**  
**Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo**

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan	Asumsi Capaian 2025	Target 2026
1	2	3	4
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	100%	100%
2	Persentase PKK Aktif	100%	100%
3	Persentase Posyandu Aktif	100%	100%

### 5.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi OPD pengampu SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Pasal 1 Ayat (7) Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

**Tabel 5.3.**  
**Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo**

No	Indikator SPM	Target Nasional	Asumsi Capaian 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

### 5.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs)

TPB/SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

**Tabel 5.4.**  
**Penetapan TPB/SDGs Perangkat Daerah Kabupaten Wajo**

No	Indikator TPB/SDGs	Target Nasional	Asumsi Capaian 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kabupaten Wajo Tahun 2026 sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas, dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dalam lingkup Dinas PMD Kabupaten Wajo berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing pada tahun berkenaan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kabupaten Wajo Tahun 2026 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai tolok ukur, panduan serta pedoman dalam melaksanakan tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Diseminasi Rencana Kerja (Renja) akan memastikan seluruh anggota instansi memiliki kesamaan pandangan mengenai kearah mana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota harus bekerja, dan bagaimana keberhasilan dan hambatan akan diukur.

#### **6.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Untuk memastikan implementasi Rencana Kerja (Renja) berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan koridor hukum serta etika pemerintahan, ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Kaidah Legalitas, yaitu setiap Program, Kegiatan dan Sub kegiatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Kaidah Akuntabilitas, yaitu seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan, baik dari sisi administrasi, keuangan, maupun hasil (kinerja) kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
3. Kaidah Efisiensi dan Efektivitas, yaitu penggunaan anggaran dan sumber daya harus dilakukan secara hemat dan optimal, serta dipastikan memberikan dampak yang nyata dan terukur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.
4. Kaidah Berbasis Kinerja, yaitu pengukuran keberhasilan didasarkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, bukan semata-mata pada penyerapan anggaran.
5. Kaidah Keberlanjutan, yaitu program yang dilaksanakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan dapat dilanjutkan atau dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat setelah intervensi Dinas PMD berakhir.


## 6.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kabupaten Wajo Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahun 2024, Renstra Periode Tahun 2019-2024 dan Renstra Transisi 2025-2026, dan memperhatikan permasalahan SKPD serta isu yang berkembang dimasyarakat. Hal-hal yang berkembang dan belum terakomodir dalam Rencana Kerja (Renja) tersebut selanjutnya akan menjadi bahan masukan dan catatan perbaikan, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas PMD untuk ditindaklanjuti. Untuk itu Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD Kabupaten Wajo, akan dijadikan acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026.

Sengkang, September 2025

Plt. Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo 



 **ANDI PALLAWARUKKA, S.IP., M.AP**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700815 199003 1 003

## LAMPIRAN